

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 04 Kota Bengkulu

Telp. (0736) 25253

Website : <https://dinsos.bengkuluprov.go.id>

email : dinsosprovbengkulu@gmail.com



KATA PENGANTAR

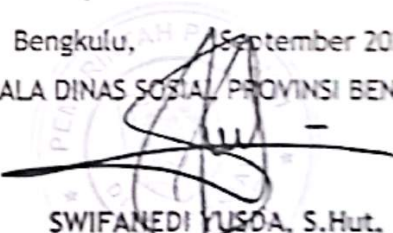
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2025 Dinas Sosial, Renja Perubahan tahun 2025 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga didasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan rencana kerja yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dimana Renja ini telah dilakukan pembahasan dan verifikasi dokumen oleh Bappeda Provinsi. Dengan disusunnya Awal Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Sosial yaitu "Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Profesional" .

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Bengkulu, 1 September 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU


SWIFANEDI YUSDA, S.Hut.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 197608152008041001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evalusi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	19
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Program dan Kegiatan Perubahan.....	29
3.2. Pendanaan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2025.....	29
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan.....	43
BAB IV PENUTUP.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan mempedomani awal RKPD tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada awal RKPD;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n-1.

Keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing Bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tahapan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah :



1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan I dan mengacu pada Awal RKPD tahun berkenaan.
2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun 2025 berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3. Program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dengan menimbang keterbatasan anggaran sehingga kegiatan awal penyusunan akan dilakukan rapat koordinasi dengan masing-masing bidang teknis Dinas Sosial dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan masing-masing program.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Awal Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);



-
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - p. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - q. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 ; dan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021.

- s. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
- t. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 32);
- u. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 54);
- v. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 antara lain :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam penyusunan kegiatan tahun 2026
4. Mendukung upaya mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dalam waktu 1 tahun anggaran

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu adalah :

1. Untuk menyiapkan awal dari program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.



2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematika Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Triwulan I tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB. III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Program dan Kegiatan Perubahan
- 3.2. Pendanaan Perubahan anggaran APBD Tahun 2025
- 3.3. Tujuan dan Sasaran Perubahan

BAB. IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Triwulan I tahun 2025

Penyusunan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Table 2.1.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Sasaran Trategis	Indikator sasaran	Target TW I	Capaian TW I
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	15 %	14,18 %
Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	15 %	0 %

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu s.d. triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dari tabel pengukuran pencapaian sasaran tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 2
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

OPD : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Awal Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I		
		Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Persentase
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.394.167.300		4.045.823.324	20,86%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	120.000.000	-	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	20.000.000	-	-	0%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	13.743.063.300		3.644.572.442	21%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	85.990.000			0%



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000			0%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000			0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5.000.000			0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100.000.000			0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum yang dilaksanakan					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000			0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	25.000.000			0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.000.000			0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.370.000			0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000			0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000			0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000			0%



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000			0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000			0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	340.000.000		73.170.882	25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	461.000.000		124.000.000	25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 Unit	210.000.000			0%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000			0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000			0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000			0%
Tujuan : Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS))	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan social					
Sasaran : Meningkatkan kapasitas	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan					



	social					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL					
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan					
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	20.000.000			0%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	129 Orang	80.360.000			0%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	30.000.000			0%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	95.000.000			0%
Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di rehabilitasi di dalam panti					
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 Orang	20.000.000			0%



Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	10.000.000			0%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.000.000			0%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000			0%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000			0%
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	2.000.000			0%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000			0%
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000			0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	13.000.000			0%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhabilitasi di dalam panti					
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 Orang	355.000.000		44.840.000	23%



Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 Orang	54.516.000			0%
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 Orang	250.435.000			0%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000			0%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000			0%
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	23 Orang	5.000.000			0%
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	2.000.000			0%
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang	30.000.000			0%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000			0%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	5.000.000			0%
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	5.000.000			0%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	15.000.000			0%



Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti					
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.193.000.000		159.240.000	22%
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	45.000.000			0%
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	887.993.000			0%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	10.000.000			0%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	20.000.000			0%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	35.440.000			0%
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000			0%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000			0%
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000			0%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	10.000.000			0%



Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	2.000.000			0%
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	22.000.000			0%
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi di dalam panti					
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 Orang	25.000.000			0%
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 Orang	20.000.000			0%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL					
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang dilaksanakan					
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	35.000.000			0%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial					
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	169 Keluarga	300.000.000			0%
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2000 Keluarga	50.000.000			0%



PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PESENTASE KEJADIAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGGULANGI					
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani					
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	50 Orang	40.000.000			0%
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 Orang	35.000.000			0%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 Unit	20.000.000			0%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	63 Orang	40.000.000			0%
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	65 Orang	10.000.000			0%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan					
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	15.000.000			0%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	15.000.000			0%
JUMLAH			19.394.167.300		4.045.823.324	20,86%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai lembaga untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Urusan Wajib Sosial menyelenggarakan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Dinas Sosial sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar di dalam Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti
6. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
7. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
8. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
10. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dalam penerapan layanan tersebut telah dilakukan pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disesuaikan dan dianalisis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator-indikator yang dapat dipenuhi untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial, yaitu :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kompetensi kesejahteraan sosial
2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) didalam panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial
3. Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS)
4. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		2021	2022	Target	Realisasi	Target	Realisasai	Target	Realisasi Tw I
1	Persentase PMKS yang tertangani	79,9 %	79,3 %	53 %	56 %	76,5 %	81,6 %	76,50 %	14,18 %
2	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	56 %	52,7 %	71,2 %	76 %	57 %	59,97 %z	60 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Provinsi Bengkulu. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu antara lain :

- 1) Belum optimalnya pendayagunaan sarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial. Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Keterbatasan SDM baik tenaga fungsional maupun staf masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 2) Belum optimalnya Dinas Sosial Kabupaten Kota dalam database penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 3) Belum maksimal Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 4) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) belum optimal dan Managemen/Pengelola yang belum professional
- 5) Belum terbentuknya panti bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial, sehingga belum optimalnya dalam pemenuhan pelayanan PMKS

Meskipun tidak secara langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, namun jika tidak segera diatasi permasalahan tersebut akan sangat menghambat kinerja dan pencapaian Visi dan Misi, karena pada hakikatnya proses pencapaian target-target pembangunan diawali dengan perencanaan yang baik.



2.4. Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian tingkat yang dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinsos berdasarkan RKPD. Adapun Lampiran RKPD dijabarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Awal Tahun 2025		RKPD Perubahan Tahun 2025	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.394.167.300,00		17.970.276.394,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	120.000.000,00	7 Dokumen	90.761.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	20.000.000,00	17 Laporan	13.395.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	13.743.063.300,00	130 Orang/ Bulan	13.081.651.894,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	85.990.000,00	1 Dokumen	83.990.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	3.500.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah					



Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5.000.000	10 Orang	600.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100.000.000	55 Orang	61.583.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum yang dilaksanakan				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.000.000,00	2 Paket	114.272.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.370.000,00	2 Paket	81.370.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	340.000.000,00	1 Laporan	333.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	461.000.000,00	1 Laporan	551.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 Unit	210.000.000,00	143 Unit	270.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000,00	12 Unit	15.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000,00	12 Unit	10.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00
Tujuan : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS))	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial				
Sasaran : Meningkatnya kapasitas	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL				
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan				
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	20.000.000,00	30 Orang	20.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	128 Orang	80.360.000,00	129 Orang	59.489.000,00



Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	30.000.000,00	50 Keluarga	21.115.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	95.000.000,00	40 Lembaga	56.100.000,00
Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani				
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di rehabilitasi di dalam panti				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 Orang	20.000.000,00	28 Orang	20.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	10.000.000,00	30 Orang	10.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.000.000,00	10 Orang	10.000.000,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	2.000.000,00	35 Orang	2.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000,00	20 Orang	5.000.000,00



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	13.000.000,00	1 Dokumen	7.983.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhabilitasi di dalam panti				
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 Orang	355.000.000,00	21 Orang	331.160.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 Orang	54.516.000,00	21 Orang	79.516.000,00
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 Orang	250.435.000,00	21 Orang	150.000.000,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000,00	21 Orang	10.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000,00	21 Orang	10.000.000,00
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	23 Orang	5.000.000,00	21 Orang	5.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	2.000.000,00	5 Orang	2.000.000,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang	30.000.000,00	21 Orang	30.000.000,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000,00	21 Orang	6.568.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	5.000.000,00	21 Orang	2.020.000,00



Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	5.000.000,00	2 Orang	2.618.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	8.455.000,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.193.000.000,00	70 Orang	1.117.120.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	45.000.000,00	70 Orang	65.000.000,00
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	887.993.000,00	70 Orang	100.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	20.000.000,00	70 Orang	30.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	35.440.000,00	70 Orang	40.440.000,00
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000,00	70 Orang	5.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000,00	70 Orang	5.000.000,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	10.000.000,00	12 Orang	15.025.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	2.000.000,00	20 Orang	2.000.000,00
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	22.000.000,00	10 Orang	22.000.000,00



Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi di dalam panti				
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 Orang	25.000.000,00	10 Orang	10.438.000,00
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 Orang	20.000.000,00	30 Orang	19.910.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL				
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang dilaksanakan				
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	35.000.000,00	15 Orang	36.570.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial				
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	169 Keluarga	300.000.000,00	220 Keluarga	301.496.000,00
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2000 Keluarga	50.000.000,00	2000 Keluarga	12.395.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PESENTASE KEJADIAN BENCANAN ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGGULANGI				
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	50 Orang	40.000.000,00	15 Orang	40.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 Orang	35.000.000,00	35 Orang	35.000.000,00



Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 Unit	20.000.000,00	33 Unit	119.675.000,00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	63 Orang	40.000.000,00	63 Orang	40.000.000,00
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	65 Orang	10.000.000,00	65 Orang	10.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan				
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	15.000.000,00		-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	15.000.000,00	1 Makam	30.000.000,00
			19.394.167.300,00		17.970.276.394,00

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Program dan Kegiatan Perubahan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD, Penyajian Program dan Kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Pendanaan Perubahan Anggaran APBD Tahun 2025

Rencana perubahan anggaran tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan
Dinas Sosial Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Pergeseran Tahun 2025		Pagu Rencana Perubahan Tahun 2025		Bertambah/ Berkurang
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			19.330.115.800,00		17.970.276.394,00	(1.359.839.406)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		15.496.534.800,00		15.070.123.394,00	(426.411.406)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		104.156.000,00		104.156.000,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	90.761.000,00	7 Dokumen	90.761.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	13.395.000,00	17 Laporan	13.395.000,00	-



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		13.828.553.300,00		13.169.141.894,00	659.411.406
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	13.743.063.300,00	130 Orang/ Bulan	13.081.651.894,00	(661.411.406)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.990.000,00	1 Dokumen	83.990.000,00	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Smesteran SKPD	4 Laporan	3.500.000,00	4 Laporan	3.500.000,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000		5.000.000	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.183.000		62.183.000	-
Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-		-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	600.000	10 Orang	600.000,00	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	61.583.000	20 Orang	61.583.000,00	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum yang dilaksanakan		352.642.500,00		465.642.500,00	113.000.000



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	64.272.500,00	2 Paket	114.272.500,00	50.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	73.370.000,00	2 Paket	81.370.000,00	8.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		15.000.000,00		15.000.000,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		804.000.000,00		894.000.000,00	90.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	-



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	333.000.000,00	1 Laporan	333.000.000,00	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	461.000.000,00	1 Laporan	551.000.000,00	90.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		325.000.000,00		355.000.000,00	30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	143 Unit	260.000.000,00	143 Unit	270.000.000,00	10.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	5.000.000,00	12 Unit	15.000.000,00	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	12 Unit	20.000.000,00	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	-
Tujuan : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS))	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial					-



Sasaran : Meningkatnya kapasitas	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL		151.704.000,00		156.704.000,00	5.000.000
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-		-	-
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		151.704.000,00		156.704.000,00	5.000.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	20.000.000,00	30 Orang	20.000.000,00	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	129 Orang	59.489.000,00	129 Orang	59.489.000,00	-



Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	21.115.000,00	50 Keluarga	21.115.000,00	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	51.100.000,00	40 Lembaga	56.100.000,00	5.000.000
Sasaran : Meningkatkan Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani					-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI		3.066.401.000,00		2.118.313.000,00	(948.088.000)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di rehabilitasi di dalam panti		66.983.000,00		66.983.000,00	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	28 Orang	20.000.000,00	28 Orang	20.000.000,00	-
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	10.000.000,00	30 Orang	10.000.000,00	-



Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.000.000,00	10 Orang	10.000.000,00	-
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00	-
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	2.000.000,00	35 Orang	2.000.000,00	-
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00	-
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.000.000,00	20 Orang	5.000.000,00	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	7.983.000,00	1 Dokumen	7.983.000,00	-



Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhabilitasi di dalam panti		736.612.000,00		617.337.000,00	(119.275.000)
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 Orang	355.000.000,00	21 Orang	331.160.000,00	(23.840.000)
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 Orang	54.516.000,00	21 Orang	79.516.000,00	25.000.000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 Orang	250.435.000,00	21 Orang	150.000.000,00	(100.435.000)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000,00	21 Orang	10.000.000,00	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 Orang	10.000.000,00	123 Orang	10.000.000,00	-
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	23 Orang	5.000.000,00	21 Orang	5.000.000,00	-
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	2.000.000,00	5 Orang	2.000.000,00	-



Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang	30.000.000,00	21 Orang	30.000.000,00	-
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	6.568.000,00	21 Orang	6.568.000,00	-
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	2.020.000,00	21 Orang	2.020.000,00	-
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	2.618.000,00	2 Orang	2.618.000,00	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	8.455.000,00	1 Dokumen	8.455.000,00	-
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti		2.232.458.000,00		1.403.645.000,00	(828.813.000)
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.193.000.000,00	70 Orang	1.117.120.000,00	75.880.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	45.000.000,00	70 Orang	65.000.000,00	20.000.000



Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	887.993.000,00	70 Orang	100.000.000,00	(787.993.000)
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	10.000.000,00	20 Orang	10.000.000,00	-
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	20.000.000,00	70 Orang	30.000.000,00	10.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	35.440.000,00	70 Orang	40.440.000,00	5.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000,00	70 Orang	5.000.000,00	-
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00	-
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	5.000.000,00	70 Orang	5.000.000,00	-
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	12 Orang	5.025.000,00	12 Orang	5.025.000,00	-



Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	2.000.000,00	20 Orang	2.000.000,00	-
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	22.000.000,00	10 Orang	22.000.000,00	-
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	Jumlah gelandangan dan Pengemis yang direhabilitasi di dalam panti		10.438.000,00		10.438.000,00	-
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	69 Orang	10.438.000,00	10 Orang	10.438.000,00	-
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant		19.910.000,00		19.910.000,00	-
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 Orang	19.910.000,00	30 Orang	19.910.000,00	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL		340.801.000,00		350.461.000,00	9.660.000
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang dilaksanakan		26.910.000,00		36.570.000,00	9.660.000



Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	26.910.000,00	15 Orang	36.570.000,00	9.660.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial		313.891.000,00		313.891.000,00	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	220 Keluarga	301.496.000,00	220 Keluarga	301.496.000,00	-
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2000 Keluarga	12.395.000,00	2000 Keluarga	12.395.000,00	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PESENTASE KEJADIAN BENCANAN ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGGULANGI		244.675.000,00		244.675.000,00	-
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani		244.675.000,00		244.675.000,00	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	50 Orang	40.000.000,00	15 Orang	40.000.000,00	-
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 Orang	35.000.000,00	35 Orang	35.000.000,00	-



Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	33 Unit	119.675.000,00	33 Unit	119.675.000,00	-
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	63 Orang	40.000.000,00	63 Orang	40.000.000,00	-
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	65 Orang	10.000.000,00	65 Orang	10.000.000,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		30.000.000,00		30.000.000,00	-
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan		30.000.000,00		30.000.000,00	-
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	15.000.000,00		-	(15.000.000)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	15.000.000,00	1 Makam	30.000.000,00	15.000.000
			19.330.115.800,00		17.970.276.394,00	1.359.839.406 00



3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perentasan ketertinggalan, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran yang lebih operasional yang dituangkan dalam renja perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025 yaitu :

Tujuan adalah:

1. Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatnya capaian kinerja OPD

Sedangkan sasaran nya sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial
2. Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD



BAB IV PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari Rencana Strategis RPJMD tahun 2021 - 2026. Penjabaran ini diharapkan mampu menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Renja Perubahan ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Penyusunan renja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Maka dengan adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa renja ini belum sempurna, oleh karena itu saran masukan sangat diharapkan agar dalam penyusunan renja di masa mendatang akan lebih baik.

Bengkulu, September 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

SWIFANEDI YUSDA, S.Hut.
Pembina Tk. I/ (IV/b)
NIP. 197608152008041001